



KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN GEOWISATA GOA PINDUL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

¹Eny Boedi Orbawati, ²Oqi Dewi Anista, ³Fadlurrahman, ⁴Seiren Ikhtiara, ⁵Joko Tri
Nugraha, ⁶Ari Mukti

^{1,2,3,5,6}Universitas Tidar

⁴UIN Sunan Kalijaga

¹enyorbawati@untidar.ac.id, ²oqidewi@gmail.com, ³fadlurrahman@untidar.ac.id,
⁴seirenikhtiara11@gmail.com, ⁵jokotrinugraha@untidar.ac.id, ⁶arimukti@untidar.ac.id

ABSTRACT

Partnership is a concept of cooperation used by the Gunungkidul Regency Tourism Office, BUMDes Maju Mandiri, and tour guide business (pokdarwis) in managing the Pindul cave. Through this partnership, the management of Pindul cave is expected to be better, but in reality there are still disobedience and lack of openness in partnership. This study aims to provide an overview of partnership between actors in the management of Pindul cave in Gunungkidul Regency. The research method used in this study is qualitative using a descriptive approach. The results showed that the optimization of partnership between actors in the management of Pindul cave runs only on the principle of mutual benefits, namely absorption of labor, reducing unemployment, and increasing the income of each actors. Meanwhile, the principle of equality and openness of partnership has not run optimally as indicated by coordination noncompliance, and lack of openness in partnership.

Keywords; partnership; tourism management; pindul cave

A. PENDAHULUAN

Kemitraan menjadi penting bagi pengelolaan destinasi wisata sebagai upaya memperkuat daya bersaing melalui ikatan-ikatan kerjasama, sehingga terjadi peningkatan produktivitas, efisiensi, jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha (Darwis & Junaid, 2016; Herlina, 2018). Kajian terdahulu menunjukkan bahwa strategi kemitraan telah banyak dilakukan di bidang pariwisata baik pada skala usaha kecil, menengah, maupun besar. Pola kemitraan yang sering terjalin antar pelaku wisata yaitu pola kemitraan subkontrak, keagenan, modal ventura, inti plasma (Pradana & Hilman, 2020; Putra, 2013; Rudi et al., 2017). Kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk konsesi, kontrak kelola, kontrak sewa, maupun hak guna bangunan (Dewanti, 2014; Wahyuni, 2016, 2017). Banyak diantara kajian tersebut mengungkapkan ketidakberlanjutan kemitraan disebabkan oleh tidakadanya keseriusan (Ricky Syuldairi & Rury Febrina, 2021), kurangnya koordinasi dan komunikasi (Hapsari &

Harsasto, 2016; Isnaningtyas, 2017; Nugroho, 2014), adanya sengketa dan ketidakharmonisan (Suciana, 2020), kurang pemahaman akan potensi kemitraan (Safitri et al., 2017). Keberhasilan kemitraan juga dipengaruhi oleh terlaksananya prinsip-prinsip kemitraan. Sejauh ini belum banyak kajian mengenai hal itu di bidang usaha pariwisata.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak potensi besar, salah satunya di sektor pariwisata. Aset kepariwisataan yang dimiliki dapat diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Marpaung dan Bahar (2002) mendefinisikan pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan perorangan atau lebih dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Pengelolaan kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam upaya menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Semakin lama wisatawan berada di suatu tempat wisata akan meningkatkan pengeluaran mereka, sehingga akan membangkitkan perusahaan jasa transportasi, hiburan, akomodasi, dan jasa lainnya.

Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2017–2019 sebanyak 40.717.543 orang. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dari tahun 2015-2018 sebanyak 1.094.982.415 orang. Jumlah devisa sektor pariwisata juga terus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 19,29 miliar dollar AS. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu pendongkrak perekonomian bagi masyarakat maupun negara. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari pelayanan jasa yang diberikan pengelola wisata kepada wisatawan. Mengingat aktifitas pariwisata tidak hanya melibatkan satu aspek, maka pelayanan ke wisatawan yang berkunjung di suatu destinasi tidak semata-mata tergantung pada peran satu aktor saja. Coleman (dalam Wulantami, 2018) mengatakan aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, artinya aktor mempunyai tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Keterkaitan aktor dari berbagai kelompok menjadi penentu dalam pengembangan pariwisata. Ini berarti diperlukannya kemitraan antar aktor dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata.

Kemitraan telah menjadi salah satu strategi dalam melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan. Shaw (2007) memberi contoh bagaimana

kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat (khususnya kelompok minoritas) dan pengusaha bidang pariwisata (business) bekerja bersama membangun pariwisata di Inggris dan Kanada. Menurut Shaw, pelaksanaan festival dan pembuatan perkampungan kelompok masyarakat dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Fyall, Garrod dan Leask (2003) berpendapat bahwa persaingan dalam dunia usaha pariwisata serta pemberian pelayanan ke customer menjadi alasan pentingnya kemitraan untuk diterapkan. Selain itu, *multiplier effect* dari pariwisata yang di dalamnya melibatkan individu ataupun kelompok menjadikan strategi kemitraan penting untuk dipahami dan diimplementasikan.

Kemitraan merupakan sebuah kolaborasi antar aktor yang bersama-sama untuk menjalankan masing-masing peran dengan capaian tujuan yang sama. Kolaborasi antar aktor ini menggunakan pendekatan *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang menunjukkan bahwa pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, mitra lain, konsumen, masyarakat, investor, lembaga sosial bersama-sama mendukung pelaksanaan sebuah program. Kolaborasi tersebut memfokuskan pentingnya hubungan antara sesama kelompok *stakeholder* dalam pengelolaan daya tarik wisata atau destinasi wisata (Tuohino dan Konu, 2014). Kemitraan ditunjukkan dengan adanya periode waktu, keterlibatan, kerjasama serta fleksibilitas dalam mencapai tujuan. Kemitraan harus mencerminkan pencapaian keberlanjutan dan pencapaian tujuan yang direncanakan, disusun, diimplementasikan dan dicapai secara bersama-sama.

Kabupaten Gunungkidul memiliki banyak objek pariwisata, salah satunya yaitu geowisata Goa Pindul. Goa Pindul adalah obyek wisata alam susur goa bawah tanah dengan aliran sungai di sepanjang lorong goa. Geowisata ini menerapkan kemitraan dalam pengelolaannya. Kemitraan dalam pengelolaan goa Pindul terbentuk karena adanya konflik berkepanjangan antar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Wisata Bejiharjo. Konflik tersebut didasari atas peningkatan jumlah wisatawan yang jumlahnya terus melonjak sehingga antar Kelompok Sadar Wisata di Desa Bejiharjo saling berkompetisi secara tidak sehat untuk menjadi pengelola goa pindul. Usaha Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menangani konflik tersebut yaitu dengan membentuk BUMDes Maju Mandiri untuk mengelola keuangan desa dan juga sebagai pengelola Geowisata goa Pindul. Pengelolaan goa Pindul saat ini dilakukan oleh tiga aktor yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, BUMDes Maju Mandiri dan unit usaha pramuwisata (pokdarwis atau operator). Dinas Pariwisata berperan sebagai

pembentuk kebijakan, BUMDes Maju Mandiri berperan dalam mengelola objek wisata goa pindul, dan unit usaha pramuwisata (pokdarwis) memiliki peran sebagai pelaksana lapangan, dimana BUMDes Maju Mandiri bertanggung jawab kepada Dinas Pariwisata dan Pokdarwis bertanggung jawab kepada BUMDes Maju Mandiri.

Kemitraan pengelolaan goa Pindul dibentuk pada bulan Juni 2017 dengan harapan goa pindul dapat terkelola lebih terstruktur dan terprosedur sehingga dapat memutus rantai konflik serta meningkatkan kunjungan wisatawan. Namun demikian, dalam dua tahun terakhir kemitraan tersebut ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kenyataannya berbagai macam masalah muncul dibalik jalinan kemitraan yang sudah dilegalkan, seperti ketidakkompakkan antar pokdarwis dalam menjual tiket masuk ke goa Pindul dan hanya lingkup internal pokdarwis yang mengetahui besaran keuntungan yang didapat, persaingan yang tidak sehat antar pokdarwis, serta munculnya tuntutan peninjauan ulang kesepakatan penyetoran keuntungan.

Beragamnya permasalahan dalam pengelolaan goa Pindul menarik perhatian peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana sebenarnya kemitraan pengelolaan goa Pindul yang selama ini telah terjalin. Padahal munculnya inisiasi melakukan kemitraan adalah untuk meredam konflik berkepanjangan antar pengelola, namun realita yang ada tampaknya tidak berjalan sesuai dengan harapan meskipun perlu diakui bahwa konflik tidak kembali mengemuka secara ekstrem. Melihat dinamika kemitraan pengelolaan goa Pindul diatas, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemitraan antar aktor dalam mengelola goa Pindul di Kabupaten Gunungkidul.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan jumlah informan yang direncanakan di awal penelitian sebanyak 5 orang, menggelinginding menjadi 9 orang yang diambil dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, BUMDes Maju Mandiri Desa Bejiharjo, Unit Usaha Pramuwisata (pokdarwis Dewabejo dan Gelaran Indah Wisata), dan Masyarakat Desa Bejiharo. Kemudian pengumpulan data menggunakan tiga teknik utama dalam kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, pembahasan kemitraan antar aktor dalam pengelolaan geowisata goa pindul dinarasikan ke dalam tiga sub pembahasan sesuai dengan dimensi kemitraan yang digunakan diantaranya prinsip kesetaraan, prinsip keterbukaan, dan prinsip azas manfaat bersama (*mutual benefit*).

Kemitraan dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu (Sulistiyani, 2004). Pada dasarnya kemitraan menciptakan kondisi "*win-win solution partnership*", yang berarti para aktor memiliki posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing untuk menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Menurut Sulistiyani (2004) tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Terjalannya kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya.

Kemitraan dapat dibentuk dengan memperhatikan beberapa kondisi, diantaranya : pertama, terdapat dua pihak atau lebih karena kemitraan tidak bisa dijalankan oleh satu aktor, melainkan dilakukan oleh dua aktor atau lebih agar dapat mempermudah pencapaian tujuan. Kedua, memiliki kesamaan visi yang berarti setiap aktor harus memiliki komitmen, pelayanan, hasil, dan manajemen yang saling terkoneksi dan serupa (Putra, 2013; Nurcahyo, 2015). Ketiga, kesepakatan dalam kemitraan dilihat melalui SOP kegiatan. SOP dibutuhkan guna perbaikan secara berkelanjutan, mempertahankan konsistensi kerja karyawan, mengetahui peran dan fungsi kerja setiap bagian/unit, memperjelas langkah-langkah tugas wewenang dan tanggung jawab, menghindari kesalahan administrasi, serta menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan ketidakefisienan (Winata, 2016).

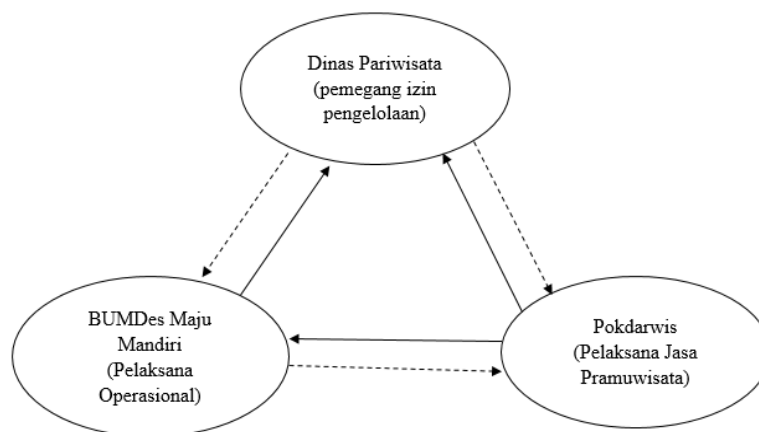
Terdapat tiga dimensi atau prinsip yang harus diperhatikan oleh semua aktor dalam membangun kemitraan (Kuswidanti, 2008; Saputra, Zaenuri, Purnomo dan Fridayani, 2019) yaitu :

1. Prinsip kesetaraan, setiap aktor setidaknya memiliki kedudukan yang sejajar satu sama lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Prinsip kesetaraan mencakup dua hal penting yaitu koordinasi kemitraan, dan sistem monitoring.
2. Prinsip keterbukaan, yaitu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan dan diketahui oleh semua mitra. Prinsip keterbukaan dalam kemitraan pariwisata mencakup dua hal yaitu transparansi kegiatan dan hasil kegiatan pengelolaan pariwisata.
3. Azas manfaat bersama (mutual benefit), yaitu semua aktor yang bermitra memperoleh manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung dari hubungan kemitraan sesuai dengan kontribusinya masing-masing.

Prinsip Kesetaraan

Dalam penelitian ini, analisis kesetaraan antar aktor memperhatikan dua hal penting yaitu aspek koordinasi dan aspek monitoring kemitraan. Koordinasi dalam pengelolaan goa pindul dilakukan oleh ketiga aktor: Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, BUMDes Maju Mandiri, dan Unit Usaha Pramuwisata berupa pola hubungan kolaborasi kemitraan

Gambar 1. Pola Kolaborasi Kemitraan antar Aktor



(Sumber: diolah oleh peneliti)

Pertama, koordinasi yang berjalan dilakukan berdasarkan visi dan kesepakatan perjanjian kerjasama antar aktor. Visi yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul yaitu *“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”*. Guna mencapai visi tersebut diciptakan perjanjian kerjasama antar aktor di ranah pengelolaan objek wisata, diantaranya perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dengan BUMDes Maju Mandiri tertuang dalam surat perjanjian kerja sama Nomor : 415.4/PK/15/2017 dan Nomor : 01/BUMDES/2017 Tentang Kerja Sama Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah. Perjanjian kerja sama juga dilakukan antara BUMDes Maju Mandiri dengan berbagai Unit Usaha Pramuwisata dalam berbagai surat perjanjian kerja sama salah satunya Nomor: 01-PK/BUMDES/2018 dan Nomor: 01/DB/VI/2018. Dalam surat perjanjian tersebut termuat jenis usaha yang dijalankan, pembagian hak dan kewajiban antar aktor, tugas pokok, SOP, serta sanksi.

Meskipun terdapat kesepakatan bersama antar aktor, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan realita di lapangan yang mana terjadi ketidaktaatan khususnya pada level pelaksanaan oleh unit usaha pramuwisata (operator). Koordinasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh operator seperti tidak mengikuti kerjabakti untuk menjaga kelestarian wisata goa pindul, perijinan operator, sertifikat pemandu, peningkatan harga tiket secara manual tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu, dan penarikan retribusi yang tidak sesuai dengan aturan sehingga berdampak pada penurunan jumlah retribusi yang masuk. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan memanfaatkan posisi yang diberikan. Pada level yang demikian, dapat dikatakan bahwa koordinasi gagal berjalan dengan baik meskipun terdapat beberapa upaya pengendalian seperti rapat berkala.

Kedua, monitoring kegiatan dalam pengelolaan goapindul bertujuan untuk menilai (mengevaluasi) kemajuan kegiatan, mengidentifikasi masalah, menilai pola kerja dan manajemen. Monitoring dilakukan dengan penyampaian laporan berkala melalui koordinasi antar aktor. Aktor yang memiliki peran utama dalam memonitoring kegiatan yaitu BUMDes Maju Mandiri karena memiliki posisi strategis selaku pelaksana operasional yang bertanggung jawab kepada pemerintah dan sebagai koordinator lapangan bagi para operator. BUMDes tersebut memonitoring kegiatan yang telah dilaksanakan oleh operator dan melaporkan hasilnya ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. Melalui kegiatan monitoring juga teridentifikasi masalah yang terjadi

dilapangan seperti yang tercantum di paragraf sebelumnya, perencanaan-perencanaan yang belum terealisasi, serta kegiatan yang berjalan tanpa perencanaan atau belum tercatat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip kesetaraan tidak berjalan dengan cukup baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya pada aspek koordinasi antar aktor. Kurangnya koordinasi mengakibatkan kerugian bagi aktor lainnya. Sedangkan aspek monitoring telah dilaksanakan sesuai aturan bahkan melalui monitoring kegiatan berhasil teridentifikasi akar masalah serta menertibkan administrasi kegiatan.

Prinsip Keterbukaan

Dua aspek yang menjadi perhatian dalam prinsip keterbukaan yaitu mencakup transparansi kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan pariwisata. Kedua aspek tersebut menjadi penting untuk dinilai karena menjamin keberlangsungan kemitraan antar aktor dalam pengelolaan goa pindul. Pada aspek transparansi kegiatan, salah satu bentuk transparansi ditunjukkan dengan adanya sistem karcis (tiket) masuk ke goa pindul. Pihak yang bertanggungjawab dalam membuat dan mendistribusikan tiket masuk ke operator (pramuwisata) yaitu BUMDes Maju Mandiri.

Gambar 2. Tiket Masuk Kawasan Goa Pindul



(Sumber : dokumentasi penelitian)

Tiket tersebut merupakan alat dan juga bukti dalam menerapkan transparansi kegiatan di lapangan. Baik BUMDes dan juga operator memiliki data terkait jumlah tiket yang terjual kepada pengunjung. Meskipun keberadaan tiket tersebut dapat dijadikan sebagai alat dan aturan dalam menerapkan transparansi, namun pada

kenyataannya masih terdapat beberapa operator 'nakal' yang memainkan harga dengan mengurangi atau menaikkan harga dan tidak memberikan tiket yang sah kepada pengunjung dengan tujuan untuk kepentingan pribadi/kelompoknya. Tindakan tersebut lantas diketahui oleh semua aktor ketika dilakukan monitoring kegiatan. Hal yang demikian tentunya menjadi ancaman bagi keberlangsungan kemitraan. Selain itu, transparansi kegiatan juga ditunjukkan melalui papan pengumuman ataupun media cetak dan *online* masing-masing aktor baik Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam websitenya wisata.gunungkidulkab.go.id, BUMDes Maju Mandiri pada website bumdesmajumandiri.id, dan di *website* pokdarwis yang ada di Desa Wisata Bejiharjo.

Kemudian pada aspek pelaporan hasil kegiatan pengelolaan pariwisata yaitu berupa pelaporan kerja (harian, bulanan dan tahunan). Laporan harian meliputi laporan penjualan tiket masuk perhari yang dilaporkan operator ke BUMDes Maju Mandiri. Setiap hari operator diwajibkan untuk melaporkan jumlah tiket yang terjual. Laporan bulanan meliputi jumlah kunjungan, jumlah tiket, dan prosentase tiket yang terjual dalam setiap bulan. Sedangkan laporan tahunan berbentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari BUMDes Maju Mandiri kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang berisikan jumlah kunjungan dan retribusi yang masuk ke pemerintah dibalik pengelolaan objek wisata goa pindul. Pelaporan kerja merupakan bentuk pertanggung-jawaban antar aktor sekaligus sebagai konsistensi dalam bermitra. Masing-masing aktor mempunyai peran dan tanggung jawab tersendiri serta alur dalam melaporkan kegiatannya. Misalnya operator bertanggung jawab kepada BUMDes Maju Mandiri, dan BUMDes Maju Mandiri bertanggung jawab kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya prinsip keterbukaan telah diterapkan meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak transparan. Sedangkan pelaporan kegiatan dilakukan sesuai dengan alur atau prosedur yang telah disepakati bersama.

Prinsip Azas Manfaat Bersama

Geowisata goapindul merupakan aset yang sangat berharga di Desa Bejiharjo yang mana dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan utama bagi semua aktor. Sebagai sumber yang sangat bernilai, tentu saja goapindul berpotensi melahirkan

konflik diantara aktor yang memiliki kepentingan dibalik pengelolaannya. Setiap pengelola merasa memiliki hak untuk memanfaatkan goa pindul. Secara historis memang pengelolaan goa pindul tidak berjalan mulus sebelum terbentuknya kemitraan di tahun 2017. Konflik antar pengelola (khususnya pramuwisata) terus terjadi yang terpotret melalui persaingan yang tidak sehat. Padahal goa pindul merupakan barang publik (miliki bersama) yang seharusnya dapat dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan manfaat bagi semua pihak. Oleh sebab itu melalui jalinan kemitraan pengelolaan goa pindul, diharapkan dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi semua pihak dan menurunkan tensi konflik berkepanjangan.

Mendiskusikan manfaat apa yang dirasakan oleh aktor pengelola, tentunya manfaat yang sangat dirasakan yakni terjadinya peningkatan pendapatan bagi semua aktor yang terlibat dalam kemitraan pengelolaan goa pindul. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul kemitraan pengelolaan goa pindul berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi daerah. Begitupula bagi BUMDes Maju Mandiri dan pramuwisata yang mendapatkan suntikan pendapatan bagi kasnya masing-masing. Kemitraan juga memberikan manfaat dalam proses komunikasi antar aktor. Sebelum dibentuknya kemitraan, proses komunikasi yang terjadi antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul kepada berbagai pengelola (khususnya yang berada disekitar goa pindul) sulit untuk dilakukan karena belum terbentuk struktur pertanggung jawaban yang jelas diantara pengelola goa pindul. Kemudian sejak terbentuknya kemitraan di tahun 2017, secara bertahap proses komunikasi semakin baik. Manfaat tersebut merupakan manfaat langsung yang dirasakan oleh semua aktor.

Bukan hanya aktor yang bermitra saja yang menerima manfaat dibalik pengelolaan goa pindul, namun masyarakat setempat yang berdomisili disekitar geowisata goa pindul turut merasakan manfaat dibalik adanya pengelolaan goa pindul. Hal ini merupakan manfaat tidak langsung yang bersifat *multiplier effects* secara ekonomi dan sosial. Melalui pengelolaan sektor pariwisata yakni geowisata goa pindul ternyata berhasil mereduksi kemiskinan bagi masyarakat setempat dengan terbukanya lapangan kerja baru. Banyak masyarakat yang beralih profesi dari petani kemudian bergabung dengan pramuwisata ataupun membuka usaha baru yang turut meramaikan *euforia* wisata goa pindul.

Kendala implementasi kemitraan dalam pengelolaan Goa Pindul sejalan dengan hasil kajian (Endarto et al., 2020) dengan temuan bahwa upaya kemitraan untuk mengembangkan komunitas lokal sebagai pelaku wisata cenderung menimbulkan konflik kepentingan, tidak transparan, dan masyarakat lokal tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kreativitas untuk mengembangkan pariwisata karena ditinggalkan oleh fasilitator. Memang kapasitas masyarakat akan sangat mempengaruhi keberlanjutan pengembangan pariwisata, namun disarankan upaya kemitraan akan lebih efektif dilakukan secara bertahap. (Endarto et al., 2020).

Peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan oleh masyarakat setempat kepada pelaku pariwisata (*community*) dan dengan bekerjasama dengan pihak lain untuk membantu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Hal ini penting bagi masyarakat dan mitra untuk mendapatkan visi dan misi yang sama. Dalam peningkatan kapasitas berbasis inisiatif lokal, pihak lain kemudian dilibatkan, yang akan menghasilkan lebih banyak sumber daya berkualitas dalam proses pengelolaan pariwisata. Di sisi lain, peningkatan kapasitas yang ditegakkan dengan program-program dari mitra pengembangan pariwisata yang tidak didasarkan pada karakteristik masyarakat setempat lebih cenderung menghasilkan pariwisata yang kurang inovatif. Pengembangan pariwisata yang dilakukan melalui pendekatan kemitraan di Indonesia cenderung menekankan pada kemitraan semu. Hal ini berdampak pada pengembangan pariwisata dimana masyarakat mendapatkan dampak ekonomi namun tidak dibarengi dengan proses pemberdayaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk berinovasi dan berpartisipasi lebih dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Kemitraan antar aktor pengelola geowisata goa pindul merupakan salah satu jalan terbaik untuk meredam tensi konflik di level pramuwisata. Konflik berhasil ditekan walaupun masih terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi oleh beberapa aktor. Berdasarkan tiga prinsip dalam kemitraan, ternyata hanya pada prinsip azas manfaat bersama yang berhasil berjalan dengan optimal. Sedangkan pada prinsip lainnya yaitu kesetaraan dan keterbukaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan guna mencapai kemitraan yang baik, perlu diperketat koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Penelitian ini terbatas

pada analisis kemitraan dengan menggunakan satu teori. Tentunya hal tersebut belum bisa menjelaskan secara rinci dinamika kemitraan pengelolaan geowisata goa pindul. Untuk memperdalam dan memperkaya pembahasan kemitraan antar aktor khususnya pada pengelolaan geowisata goa pindul, diperlukan analisis menggunakan berbagai teori kemitraan ataupun dari sudut pandang berbeda misalnya dari perspektif kebijakan, hukum, dan perilaku organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwis, & Junaid, I. (2016). Kemitraan Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata dan Industri Hospitality. *Jurnal Kepariwisataaan*, 10(1), 1–13.
- Dewanti, M. A. (2014). Analisa Pola Partnership Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Umbul Tirto Marto Pengging Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2014. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(4), 61–75.
- Endarto, S. A., Sudiby, D. P., & Haryanti, R. H. (2020). Strategies and Challenges of Capacity Building in Partnership Tourism Development in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 510, 295–302. h
- Fyall, A., B. Garrod, dan A. Leask. (2003). *Managing visitor attractions: New directions*. Butterworth-Heinemann: Oxford.
- Hapsari, F. A., & Harsasto, P. (2016). Pola Kemitraan Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan Kelompok Prenjak Dalam Pengelolaan Eco Edu Wisata Tapak Kota Semarang Tahun 2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 191–200.
- Herlina, H. (2018). Urgensi Kemitraan Bagi Pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal. *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 3(1), 1–15.
- Isnaningtyas, Y. (2017). Analisis Kemitraan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Oleh : Yuliana Isnaningtyas. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(3), 551–560.
- Kuswidanti. (2008). *Gambaran kemitraan ilmu sektor dan organisasi di bidang kesehatan dalam upaya penanganan flu burung di bidang komunikasi komite nasional flu burung dan pandemi influenza (komnas FBPI)*. Skripsi: Universitas Indonesia.
- Marpaung, H. dan H. Bahar. (2002). *Pengantar pariwisata*. Alfabeta: Bandung.
- Nugroho, S. S. (2014). *Pola Kemitraan Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kepulauan*

- Karimunjawa Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 4(1), 56–65.
- Nurchahyo, R. J. (2015). Keterkaitan visi, misi, dan values terhadap kinerja karyawan perusahaan kulit “dwi jaya”. *Jurnal Khasanah Ilmu*, 6(2), 87-94.
- Pradana, R. R., & Hilman, Y. A. (2020). Kemitraan Pemerintah Desa Mendak Kabupaten Madiun dan Perhutani dalam Pengelolaan Pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(1), 68.
- Putra, A. S. (2013). Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5(3), 189–200.
- Ricky Syuldairi, & Rury Febrina. (2021). Kemitraan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Mangrove di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 130–153.
- Rudi, R., Hakim, L., & Mone, A. (2017). Kemitraan Pemerintah Dengan Asita Dalam Promosi Kunjungan Wisata Di Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 95.
- Saputra, G. R., M. Zaenuri, E. P. Purnomo, H. D. Fridayani. (2019). Kemitraan pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten tasikmalaya tahun 2017 (studi kasus objek wisata gunung galunggung kabupaten tasikmalaya). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 298-341.
- Safitri, D. P., Edison, & Kurnianingsih, F. (2017). Analisis Sound Governance : Model Kemitraan Pemerintah Daerah dan Civil Society Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(2), 35–47.
- Shaw, S. (2007). Ethnic quarters in the cosmopolitan-creative city. Dalam G. Richards dan J. Wilson (Ed.). *Tourism, creativity and development* (pp. 189-200). Routledge: New York.
- Suciana, F. (2020). Kemitraan Dalam Pengelolaan Objek Wisata Istano Basa Pagaruyung dan Batu Angkek-Angkek Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Semarang: Universitas Dipenogoro*.
- Sulistiyani, A.T. (2004). Kemitraan dan model-model pemberdayaan. Gava Media: Yogyakarta.
- Tuohino, A. dan Konu, H. (2014). Local stakeholders' views about destination management: Who are leading tourism development?. *Tourism Review*, 69(3), 202-215.

- Wahyuni, M. A. (2016). Studi Kemitraan Desa Adat Dengan Pelaku Usaha Wisata Untuk Pengembangan Ekowisata Biorock Di Desa Pemuteran. *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, 17, 25–32.
- Wahyuni, M. A. (2017). Studi Kemitraan Desa Adat Dengan Pelaku Usaha Wisata Untuk Pengembangan Ekowisata Lovina Di Kabupaten Buleleng. *Media Komunikasi Geografi*, 18(1), 14–23.
- Winata, S. (2016). Perancangan standard operating procedure (SOP) pada chocolab. *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 1(1).
- Wulantami, A. (2018). Pilihan rasional keputusan perempuan sarjana menjadi ibu rumah tangga. *Jurnal Dimensia*, 7(1), 1-22.